

ETIKA POLITIK

FRANZ MAGNIS SUSENO

Oleh : Wahyu Trisno Aji



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

ETIKA POLITIK FRANZ MAGNIS SUSENO

Penulis :

Wahyu Trisno Aji

ISBN : 978-623-8725-35-9

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Jannata Utswatun Khasanah, S.T.

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Marketing : 085961447209

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Agustus 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PROLOG

Dalam definisi umum, etika dipahami sebagai cabang filsafat membicarakan mengenai baik-buruk perilaku manusia, Konsep ini lebih dipandang sebagai sebuah seni untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan. Etika sering dimengerti pula sebagai refleksi dari nilai filosofi moral,¹ sehingga disinilah etika diposisikan sebagai ilmu, juga sebagai konsep wacana normatif membahas persoalan baik atau buruknya tindakan, sekaligus menyoroti kewajiban manusia.² Etika sebagai bentuk penilaian menanyakan bagaimana tindakan semestinya dilakukan, tindakan seperti apa untuk memutuskan sesuatu, atau bahkan hal baik atau buruk seseorang melakukan tindakan tertentu?. Semua menjadi tanda tanya besar dalam etika sebagai ilmu yang mengkaji mengenai moral praktis sebagai tolak ukur.

Perlu diketahui etika dan moral memiliki perbedaan kontras. Hematnya, etika menjadi cabang filsafat atau pemikiran kritis dan ilmu tentang pandangan dalam moral,³ Sedangkan moral merupakan ajaran-ajaran, wejangan, khotbah, rujukan, peraturan serta ketetapan lisan maupun tulisan mengenai bagaimana manusia bertingkah laku menjadi manusia baik,⁴ baik terhadap dirinya, kepada orang lain maupun baik terhadap alam. Moral menjadi konsep tindakan realitas di dunia dalam skop baik dan buruk perbuatan, tentu moral menjadi satu nilai ajaran praktis, yang kemudian etika muncul di sana sebagai ilmu menjelaskan tentangnya.

Pembahasan mengenai etika memang menjadi diskusi yang panjang, sebab yang di tampilkan di sana adalah tentang perilaku manusia, bagaimana menilai seseorang dalam tindakan tertentu. Tentu aspek etika merujuk pada tatanan yang lebih kompleks, manusia sebagai makhluk bermoral juga adalah sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain yang diantaranya mereka saling membutuhkan dan saling melindungi. Sehingga, setiap tindakan atau perilaku yang di lakukan manusia haruslah berdasarkan identitas diri sebagai makhluk bermoral.⁵ Dalam aspek kehidupan sosial manusia, terutama dalam persoalan dimensi politik, etika memiliki peran yang sangat penting dalam keputusan pelaksanaan kebijakan. Nilai-nilai etika membentuk dasar moral bagi perilaku politik, menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, dalam konteks kebijakan dan tindakan politik.⁶

¹ Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat, Etika Dan Ilmu Pengetahuan: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Konteks Indonesia" (Humanika. Vol 17. No 1. 2017). Hlm 81 akses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/viewFile/5313/4774>

² Haryatmoko. "Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi" (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama. 2011). Hlm 2

³ Laila, Aturkian. "Penegakan Hukum Dan Moralitas Manusia Dalam Perspektif Filosofi" (Jurnal Panah Keadilan. Vol 2. No 1. 2022). Hlm 32 akses di <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/711/618>

⁴ Naibi. "Murtadha Muthahhari : Filsafat Etika Islam" (Jurnal Intelektual. Vol 10. No 1. 2020). Hlm 107 akses di <https://www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/intelektual/article/download/1121/736>

⁵ Fajrussalam, Hisny. Dkk. "Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Makhluk Yang Bermoral." *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 3. No 2. 2023). Hlm 1709. Akses di <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/483/415>

⁶ Djuyandi, Yusa. "Pengantar Ilmu Politik." (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers) 2023. Hlm 38

Politik adalah arena di mana keputusan kolektif dibuat, kekuasaan diorganisir, dan sumber daya didistribusikan dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan Peter Frankel (1926) menerangkan politik merupakan cara bagaimana mencapai kondisi tatanan sosial yang baik dan berkeadilan,⁷ sedangkan Thomas T. Pureklolon (2018) mengatakan politik sebagai sebuah seni dalam kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan.⁸ konsep politik dengan definisi ini demikian tak lepas dari istilah “kekuasaan” yang dimaknai sebagai posisi seseorang mampu mempengaruhi orang lain. Kekuasaan bagi Bertrand Russell (1872-1970) merupakan hasil pengaruh dari yang diinginkan.⁹ Russell menjelaskan bahwa dorongan seseorang berkuasa tidak mengenal batas, selalu ada keinginan berkuasa mempengaruhi seseorang mencapai hal kepentingan. Setiap orang memiliki dorongan untuk berkuasa, baik seorang penguasa yang di legitimasi hukum/ konstitusi, atau para massa memiliki dorongan berkuasa, tetapi cukup menjadi pengikut dari seorang penguasa atau pendukung.¹⁰

Politik menekankan tindakan nyata diambil oleh individu atau kelompok, melibatkan pembuatan dan kepaTuhan terhadap kebijakan, yang tak lain tujuan untuk memperoleh kebahagiaan antara pemerintah dan juga masyarakat,¹¹ sekaligus menekankan kerjasama, konsensus, dan pengorbanan.¹² Dalam kerjasama inilah dituntut tindakan mengepentingkan nilai moral etis. Saat etika dihadapkan dengan politik, seorang pemimpin (apapun sejenisnya yang memiliki kuasa) bisa diberitahu untuk memiliki kemampuan untuk tidak merugikan orang lain.¹³

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk politik yang dapat memperoleh sifat moral yang tinggi,¹⁴ karena dalam politik diperkenalkan dengan permasalahan masyarakat dengan berbagai perdebatan untuk bertujuan mencapai sesuatu hal bersama.¹⁵ Diskusi persoalan etika dan politik menjadi diskusi yang cukup panjang, para pemikir barat dan timur (Islam) memiliki pemikiran corak yang khas jika berkenaan dengan diskusi etika dan politik.

Dalam buku Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution berjudul “*pemikiran politik Islam : dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*” membagi periode pemikiran politik Islam diklasifikasi setidaknya menjadi tiga periode, yakni Periode Klasik (hingga tahun 1250), Periode Abad Pertengahan (1250-1800), dan Periode

⁷ Halim. Abd. “*politik lokal : aktor, problem, dan konflik dalam arus demokratis*” (malang : intrans publishing. 2018). Hlm 1

⁸ Pureklolon. Thomas T, “*politik nasionalisme : narasi nasionalisme dalam membangun kesadaran berpolitik dan bernegara*” (malang : intrans publishing. 2018). Hlm 5

⁹ Russell, Bertrand. “*Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Dan Politik*” Terj Hasan Basri. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor. 2019). Hlm 29

¹⁰ Russell, Bertrand.*Ibid* Hlm Vi

¹¹ Hamid, Ihsan. “*Perilaku Politik : Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi Di Era Post Truth*”. (Sanabil. 2020). Hlm 114

¹² Pureklolon, Thomas Tokan. “*Komunikasi Politik, Mempertahankan Integrasi Akademis, Politikus Dan Negarawan*”. (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama. 2018). Hlm 108

¹³ Thompson, Dennis. “*Etika Politik Pejabat Negara*”. Terj Benyamin Molan. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor. 1999). Hlm Xix

¹⁴ Rachmawati. Diana widhi. Dkk. “*pengantar ilmu politik*” (jawa tengah : Eureka Media Aksara. 2022). Hlm 8

¹⁵ Pureklolon. Thomas T, “*politik nasionalisme : narasi nasionalisme dalam membangun kesadaran berpolitik dan bernegara*” ...*Ibid* Hlm 5

Abad Modern (1800 sampai sekarang). Era klasik dan pertengahan memiliki corak pemikiran khas yakni pemikiran mereka masih bercorak pada khalifah sentris. Khalifah memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan dan rakyat diperintahkan untuk patuh terhadap seorang penguasa. Kekuasaan pada masa ini ditandai dengan legitimasi dari Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW.¹⁶

Pada periode klasik dan abad pertengahan muncul para sarjana Islam yang memiliki kekuatan dalam aspek muatan politik, mereka berusaha mengintegrasikan pentingnya agama dalam politik, begitupun sebaliknya. Adapun tokoh Sarjana Islam pertama dikenal menuangkan gagasannya dalam politik adalah Ibnu Arabi (1165-1240 M), kemudian setelahnya muncul pemikiran seperti Al-Farabi (870-950 M), Al-Mawardi (972-1058), Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406). Tokoh-tokoh besar periode Islam klasik dan periode pertengahan memiliki corak yang sama dalam konsep pemikiran politik mereka, bahwa keberadaan moral atau etika sangat penting dalam politik. Hal demikian bisa dilihat dalam pemikiran Al-farabi bahwasanya seorang kepala negara ideal haruslah memiliki 12 kualitas luhur yang salah satunya ialah berjiwa besar dan berbudi luhur, cinta keadilan dan benci kezaliman dan cinta kejujuran dan benci kebohongan. Kemudian menurut Al-farabi bahwa fungsi kepala negara tak lain dari mendidik manusia menjadi makhluk yang berakhlak baik.¹⁷

Dalam pandangan Al-Ghazali dalam buku "*Al-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihati Al-Muluk*" menjelaskan seorang penguasa haruslah memiliki tiga hal, yakni agama, akhlak dan intelektual. Mengenai akhlak di seajajarkan dengan moral seorang penguasa, tentu dalam catatan ini bahwa seorang penguasa haruslah mereka memiliki akhlak yang mulia, menjadi cermin atau contoh baik bagi warga negara. Al-ghazali menerangkan bahwa seorang penguasa yang bermoral adalah salah satunya ialah mereka berbuat seadil-adilnya, karena jika seorang penguasa berbuat adil maka niscaya dunia akan berjaya dan rakyat akan merasa aman.¹⁸

Tokoh seperti Al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang hampir sama dengan corak politik al-farabi, bahwa penekanan etika dalam politik sangatlah penting. Kriteria-kriteria seorang pemimpin dan juga eksistensi dari fungsi dan tujuan negara tak lepas dari tujuan moral pula. Bahkan pandangan unik dari Ibnu Taimiyah dikutip dari buku Munawir Sjadzali adalah seorang kepala negara yang adil dan bermoral lebih baik untuk ada dan tetap dipertahankan daripada sebuah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang beragama Islam, tetapi berbuat zalim.¹⁹

Kemudian, masuk periode abad Islam modern (kontemporer) dilatarbelakangi setidaknya tiga hal diantaranya *pertama* kerapuhan Islam disebabkan faktor internal, *kedua* intervensi dari pemikir barat dan sekaligus rongrongan barat

¹⁶ Iqbal muhammad. Amin husein nasution. "*pemikiran politik Islam : dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*" (jakarta : kencana. 2010). Hlm 1-2

¹⁷ Iqbal muhammad. Amin husein nasution. "*pemikiran politik Islam : dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*"... Ibid Hlm 10-14

¹⁸ Al-ghazali. Imam. "*al-tibr al-masbuk fi nasihati al-muluk*" terj abdul rosyad shiddiq. (jakarta selatan : PT qaf media kreatifa. 2020). Hlm 99

¹⁹ Triono. "*corak pemikiran politik dalam Islam : zaman klasik, pertengahan dan kontemporer*" (Jurnal Tapis. Vol 7. No 12. 2011). Hlm 40 akses di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1528/1268>

terhadap kekuasaan politik dan *ketiga* keunggulan barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.²⁰ Pada abad modern lahir beberapa pemikir seperti Sayyid Al Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Ali Abdurraziq (1888- 1966), Ali Syari'ati (1933-1977), Mahmud Syaltut (1893-1963), Thaha Husein (1889-1973), Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966), Dlsb.

Pada abad modern terdapat setidaknya dua pandangan pemikiran dalam politik Islam, yakni pertama mengeksklusifkan Islam menjadi pedoman utama dan menentang pada pemikiran barat dalam pemikiran politik, dan kedua pemikir yang terbuka pada pemikiran barat yang mengkolaborasikan pemikiran barat dan Islam. Dalam hal ini bisa dilihat dalam pemikiran Sayyid Al Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897 M) yang memiliki pandangan pembaharu Islam politik, hal demikian dibuktikan dirinya mengganti bentuk khalifah menjadi republik. Baginya problem politik dalam Islam adalah kebebasan dan kungkungan kolonial, ia menolak adanya kerja sama dengan para penjajah sebagaimana ditegaskan dalam gagasan Ahmad Khan di India. Al-Afghani menawarkan kembali pada Islam yang benar dengan mengembangkan musyawarah, mengedepankan nilai-nilai moral agama Islam dan bersatu atau solidaritas dalam saling membantu sesama.²¹

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) memiliki pandangan menegaskan jabatan khalifah sangat diperlukan, baginya jabatan khalifah merupakan *syarat* keberadaannya sangat atensi dalam rangka penerapan hukum Islam, baginya bentuk pemerintahan yang lain tidak mampu untuk menerapkan syariat Islam. Rasyid Ridha berusaha untuk menjelaskan betapa kompleksnya ajaran-ajaran dalam Islam, ia menolak bentuk kebangsaan berdasarkan pandangan barat dan berpendapat bahwa dalam ajaran Islam rasa kebangsaan bisa tumbuh di atas dasar keagamaan. Pada akhirnya Ridha menjelaskan tujuan pemikiran politiknya ialah mengenai teori klasik khalifah sebagai tolak ukur bagi penyelenggaraan kekuasaan secara benar sebab sistem tersebut sudah jelas diatur dalam Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*.²²

Selanjutnya, pemikiran Ali Abdurraziq (1888- 1966) dibidang memiliki kontroversi sebab gagasannya selain melakukan kritikan mengenai keabsahan kekhalifahan, sekaligus dirinya mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan Islam. Setidaknya ada tiga hal penting pemikiran politik Ali Abdurraziq kontroversi diantaranya *pertama* menurutnya Nabi Muhammad SAW tidak membangun negara, *kedua* Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif, *dan ketiga* tipe-tipe kepemimpinan pasca wafat Nabi SAW tidak memiliki dasar doktrin Islam. Meskipun pemikiran Ali Abdurraziq memiliki tendensi skeptis dan kritis terhadap pemikiran-pemikiran Islam sebelumnya, pandangan Ali Abdurraziq memang banyak

²⁰ Vita Fitriani. "menilik perkembangan pemikiran politik Islam masa modern : sebuah pembacaan awal" (*Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol 14. No 1. 2014). Hlm 1 akses di <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/3332/2803>

²¹ Iqbal Muhammad. Amin Husein Nasution. "pemikiran politik Islam : dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer"... *Ibid* Hlm 63-66

²² Iqbal Muhammad. Amin Husein Nasution. "pemikiran politik Islam : dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer"... *Ibid* Hlm 82-84

menimbulkan kontroversi dan cenderung dianggap menjiplak dari pemikir-pemikir barat yang terkenal dengan sekularisme.²³

Tentu corak pemikiran Islam dari klasik, abad pertengahan hingga modern memiliki satu kekuatan bahwa mereka masih tetap berpegang pada prinsip moral meskipun cara berpikir mereka berbeda. Masih menekankan satu hal kekuatan bahwa nilai-nilai moral dalam apapun bentuknya, didapatkan dalam Islam maupun dalam ajaran non Islam tentu tetap disebut sebuah moral politik. Dalam khazanah keilmuan politik Islam, memang tidak bisa dipungkiri terdapat perdebatan diantara para intelektual Islam mengenai eksistensi negara dan agama. Pandangan-pandangan yang berbeda ini setidaknya menghasilkan tiga poin penting yang diperoleh, diantaranya.²⁴

- a) Negara dan agama terintegrasi, artinya baik agama dan negara tidak bisa dipisahkan karena memiliki fungsinya. Kelompok pandangan ini sudah ada sejak dulu dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan empat khalifah pengganti Nabi SAW.
- b) Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan dikarenakan Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul yang mengajak manusia hidup dengan berakhlak mulia, budi pekerti dan Nabi tidak pernah memberikan arahan bagaimana sebuah negara dalam Islam, dan
- c) Negara dan agama saling membutuhkan atau dikenal sebagai paradigma simbolik. Dalam pandangan tersebut di posisikan bahwa agama membutuhkan negara sebagai instrumen untuk menyebarkan ajarannya dan negara memerlukan agama dalam pembinaan moral serta pertimbangan pembuatan kebijakan.

Untuk melihat perjalanan masa pemikiran politik di sisi lain peradaban Islam, terkhususnya di dalam dunia barat. Suaedi di bukunya berjudul "*Pengantar Filsafat Ilmu*" mengklasifikasi pembagian periode pemikiran tokoh filsafat di barat, yakni dimulai dari periode klasik/yunani, masa abad pertengahan, abad modern dan abad kontemporer.²⁵ Keempat periode ini memberikan dan menunjukkan secara lebih lebar bagaimana perjalanan para tokoh pemikir barat dalam menyebarkan pengetahuan.

Dimulai dari Periode klasik atau masa yunani, yakni masa yang cukup penting karena dalam catatan sejarah manusia terjadinya pergolakan pemikiran dari mempercayai sebuah kepercayaan Mitosentrisme²⁶ sampai dengan perubahan kepercayaan masyarakat menjadi logosentrisme.²⁷ Perkembangan masyarakat

²³ Vita fitria. "menilik perkembangan pemikiran politik Islam masa modern : sebuah pembacaan awal" ..Ibid Hlm 5-8

²⁴ Aan supian. "etika politik & pemerintahan Islam dalam perspektif hadis.(bengkulu : CV zizie utama. 2019). Hlm 4

²⁵ Suaedi. "pengantar filsafat ilmu" (bogor : IPB press. 2016). Hlm 1

²⁶ Mitosentrisme merupakan masa dimana manusia mempercayai sebuah mitos sebagai sebuah kebenaran. Masa ini manusia mempercayai keberadaan dewa-dewi sebagai sosok Tuhan, mereka mempercayai bahwa sebuah kejadian berasal dari sang dewa, semisalnya terjadinya hujan karena pemberian dari dewa zeus, kesuburan tanah dari dewi demeter, dlsb nya. Selengkapnya baca di suaedi. "pengantar filsafat ilmu"...Ibid Hlm 1

²⁷ Logosentrisme merupakan keyakinan bahwa yang menjadi dasar dari segala Pikiran dan tindakan adalah realitas atau kebenaran yang sesungguhnya. Ciri khas dari logosentrisme adalah pada penekanan dalam rasio dan akal budi sehingga pemikiran logosentrisme cenderung menolak mitos atau khayalangan dan sejenisnya. Logosentrisme memperlakukan makna sebagai konsep atau

yunani klasik kala itu masih terbelenggu oleh kepercayaan nenek moyang yang cenderung tidak bisa dibuktikan secara rasional dan logis. Perihal persoalan etika, setidaknya terdapat 3 (tiga) tokoh besar memiliki pandangan mengenai etika, yakni Socrates, Plato dan Aristoteles. Socrates (470 SM- 339 SM) merupakan filsuf awal klasik yunani yang memiliki pemikiran dalam menggugat kuat doktrin mitos dewa dewi yunani dan dogma sofisme.²⁸ Robert C. Solomon dan kathleen M. Higgins (2003) menerangkan bahwasanya socrates merupakan laki-laki asketis yang memiliki misi untuk menyelamatkan jiwanya terhadap berbagai kebohongan atas keraguan atas kepercayaannya, dan misi politik adalah menggugat sistem pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang tidak ahli.²⁹ Adapun juga Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) mendiskusikan etika dalam politik khususnya dalam gambaran negara ideal,³⁰ juga bagaimana seorang pemimpin menjalankan pemerintahan supaya negara bisa tetap stabil dan warga negara tetap sejahtera.³¹ Plato dan Aristoteles dalam gagasannya seperti sudah diracuni oleh kehidupan filosofis socrates bahwa sebuah moral memang sangat perlu untuk hadir untuk mencapai kebenaran, dan sangat penting ada dalam kekuasaan untuk mencapai sebuah kekuasaan dengan tujuan sejatinya adalah kesejahteraan warga negara maupun kemajuan pemerintahan didalam suatu negara. Jika mengikuti gagasan Cicero (100-43 SM) bahwa penggunaan politik secara benar dan sesuai dengan peraturan pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan untuk warga negara. Setiap warga negara yang memahami prinsip tersebut akan menyadari bahwa setiap individu terhadap keberadaan saling menjaga dan saling menghormati.³²

Kemudian, periode abad pertengahan dimulai dari abad ke 5 sampai dengan abad ke 15 Masehi. Abad ini ditandai dengan lahirnya filsafat eropa, abad ini di eropa barat mengalami sebuah situasi perubahan pemikiran dari

representasi logos sebagai sarana untuk mendekati kebenaran mutlak dan memahami struktur dasar realitas. Selengkapnya baca di Fatimah. "*semiotika : dalam kajian iklan layanan masyarakat (ILM)*" (Sulsel : Tallasa Media. 2020). Hlm 55

²⁸ Sofisme merupakan sebuah paham atau ajaran yang menganggap sebuah kebenaran tersebut relatif tergantung setiap orang yang mampu mengargumentasikannya. Dengan artian bahwa paham ini memberikan sebuah makna setiap manusia yang mampu mempertahankan kebenaran dan memiliki kekuatan argumentasi yang kuat, maka itu dianggap kuat selagi dia memiliki kompetensi atau kemampuan menyampaikan sebuah pesan/pengetahuan.

²⁹ Robert C. Solomon dan kathleen M. Higgins. "*Sejarah Filsafat*" Terj Saut Pasabiru (Yogyakarta : Benteng Budaya. 2003). Hlm 80

³⁰ Hardiman. F. Budi. "*filsafat modern : dari machiavelli sampai nietzsche*" (jakarta : PT gramedia pustaka utama. 2004). Hlm 15

³¹ MA. Ikhwan. "*machiavelli : pembenaran kekerasan dalam politik kekuasaan*" (al-ijtima'i. Vol 2. No 1. 2016). Hlm 111 akses di <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/544/344>

³² Muhammad. Ali Abdul Mu'ti. "*filsafat politik antara barat dan Islam*" (bandung: CV pustaka setia. 2010). Hlm 72

antroposentrisme³³ menjadi Teosentrisme.³⁴ Pada abad pertengahan keilmuan berkonsentrasi pada kemajuan ilmu dan agama, tokoh-tokoh Barat seperti Anselmus (1033-1109 M), Abaelardus (1079-1143), dan Thomas Aquinas (1225-1274). Para pemikir besar abad pertengahan berkonsentrasi pada bagaimana pembentukan sebuah negara dan pemerintahan yang berpegang teguh pada moral-moral nilai agama, keyakinan kuat terhadap keabsolutan Tuhan di abad pertengahan di barat menjadi pusat dorongan pandangan seorang pemimpin haruslah mentaati perintah Tuhan dengan mentaati perintah-perintah agama dalam menjalankan kekuasaan.³⁵

Namun disisi lain, dalam konteks politik ada beberapa tokoh pemikir atau filsuf di akhir abad pertengahan yang memiliki pandangan berbeda dengan para pemikir teosentris, tokoh pemikir lahir di masa dikenal dengan masa Renaissance³⁶ dan humanisme yang berlangsung pada abad ke 15 -16 M. Tokoh seperti Niccolo Machiavelli (1469-1527) yakni ahli politikus sekaligus filsuf Italia

³³ Antroposentrisme adalah suatu pandangan atau sikap yang menempatkan manusia sebagai pusat atau fokus utama dalam kerangka penilaian dan interpretasi terhadap dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai entitas yang paling penting, memiliki nilai lebih tinggi daripada elemen lainnya di alam. Pandangan antroposentris cenderung mendahulukan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk atau lingkungan lainnya, sering kali mengabaikan dampak dan konsekuensi terhadap ekosistem global. Meskipun manusia memiliki peran dominan dalam dunia ini, sikap antroposentris yang ekstrim dapat menyebabkan perilaku eksploitatif terhadap alam dan makhluk lainnya, tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Baca di Al Munir, M. Ied. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*. Vol 9. No 1. 2023). Hlm 19 akses di <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/yaqzhan/article/view/10000>

³⁴ Teosentrisme merupakan faham memahami bahwa hakikat realitas transenden bersifat suprakosmos, personal dan ketuhanan. Konsep ini merujuk pada bagaimana posisi manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan tidak ada segala sesuatu yang tidak diciptakan oleh tuhan, sehingga tuhan menjadi pusat atas segalanya. Pandangan ini menyatakan bahwa keberadaan dan makna hidup terkait erat dengan keberadaan Tuhan atau kekuatan rohaniah tertinggi, Prinsip teosentris juga dapat mencakup pemikiran bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan spiritual atau pencerahan yang lebih tinggi, dan setiap tindakan seharusnya mencerminkan upaya untuk menghormati atau memahami kehendak ilahi tersebut. Baca selengkapnya di Madi. Faisol Nasar Bin. "*Ilmu Kalam*" (Jember : IAIN Jember Press. 2015). hlm 55

³⁵Robert C. Solomon dan kathkeen M. Higgins. "*sejarah filsafat*".... *Ibid* Hlm 259-262

³⁶ Masa Renaissance, diketahui pada abad ke 15 sampai dengan abad ke 18 dianggap sebagai abad pertengahan sebagai zaman kegelapan, banyak peristiwa penting yang dalam catatan sejarah eropa terjadinya diskriminasi, genosida, peperangan, dlsb. Kemudian masyarakat eropa kala itu muak dengan semua kejadian yang terjadi, mereka ingin mengembalikan kejayaan masa peradaban yunani kuno yang begitu maju. Kemudian langkah yang diambil oleh masyarakat eropa saat itu adalah pembaharuan yang dikenal dengan istilah Renaissance (kelahiran kembali atau lahir kembali. Masa Renaissance mencirikan periode kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan humanisme setelah zaman Abad Pertengahan yang kental dengan dogma agama. Pada masa ini, terjadi pemulihan minat terhadap warisan budaya Klasik Yunani dan Romawi, yang menginspirasi perkembangan seni rupa, sastra, musik, dan ilmu pengetahuan. Renaissance dapat berkembang dengan pengaruh kaum borjuis karena peranan humanisme yakni kelompok manusia yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari dan mendalami buku-buku klasik sejarah. Humanisme menjadi mazhab filosofi yang menekankan pada martabat manusia, menjadi landasan intelektual bagi perkembangan pendidikan dan pemikiran bebas. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan William Shakespeare muncul sebagai ikon kreativitas dan kecemerlangan dalam berbagai bidang. Selengkapnya baca di Basri. "*sejarah eropa*" (yogyakarta : Suluh Media. 2016). Hlm 7-8

yang disegani di eropa pada abad pertengahan, ia menjelaskan persoalan politik yang terkenal radikal sebab memposisikan seorang pemimpin dan yang amat kuat tanpa batasan moral dan agama.³⁷

Dalam pandangan Niccolo Machiavelli di karyanya berjudul sang pangeran “// *principe*” menerangkan bagaimana perpolitikan dari seorang penguasa yang semestinya harus berkriteria seperti singa yang ganas, menakutkan, bengis, pemberani sekaligus menjadi rubah yang cerdik. Bagi machiavelli, sebuah moral dalam kekuasaan bahkan tidak diperlukan demi sebuah kekuasaan, prinsip pandangan machiavelli adalah lebih baik sosok penguasa dan negara mengorbankan warga negara daripada negara dan kekuasaan dari penguasa terancam, meskipun ia harus berbuat keji kepada siapapun berpotensi mengancam kekuasaan.³⁸

Kemudian masuk pada periode abad modern tercatat dimulai pada abad ke 16M dengan corak pemikirannya antroposentrisme,³⁹ corak pemikiran mengataskan pemikiran manusia dan pada manusia. Para pemikir abad modern awal mulai meletakkan berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan pengamatan ilmiah dibuktikannya pada masa ini para pemikir-pemikir tidak lagi terkungkung pada doktrin gereja abad pertengahan. Di masa ini (abad modern) lahir para pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883), dan masih banyak lagi.⁴⁰

Perihal gagasan persoalan etika dan politik di abad awal modern, tentu perlu menengok gagasan Thomas Hobbes (1588-1679) yang cukup unik, sebab dirinya memiliki pandangan kondisi alamiah manusia pada dasarnya merupakan makhluk rakus, serakah, saling mengawasi, saling menyerang, sehingga mereka menjadi serigala yang saling memangsa bagi sesama (*homo homini lupus*).⁴¹ Kondisi seperti ini memang tidak bisa dipungkiri tidak muncul pula dalam diri manusia dalam ranah politik yang dicatat sebagai jalan kekuasaan untuk bisa mengontrol dan mempengaruhi banyak orang. Sehingga manusia sebagai makhluk politik ingin mencapainya. Baik itu dengan cara mengikuti jalur benar dan jujur, atau bahkan melalui tindakan tidak benar seperti menghalalkan berbagai cara mendapat dan mempertahankan kekuasaan.⁴²

Lebih lanjut, Thomas Hobbes dalam konsep politik membentuk negara seperti sosok *leviathan*, yakni makhluk mitologi sejenis monster laut raksasa yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah perjanjian lama. Dalam aspek politik, hobbes melihat negara sebagai *leviathan* memiliki ruang gerak kekuasaan

³⁷ Machiavelli. Niccolo. “sang penguasa : surat seorang negarawan kepada pemimpin republik” terj C. Woekirsari. (jakarta : PT gramedia pustaka utama.1991). Hlm 86

³⁸ Wijaya, daya negeri. Dkk. “*humanisme menurut niccolo machiavelli*” (jurnal teori dan praksis pembelajaran ips. Vol 2. No 2. 2018). Hlm 6 akses di <http://journal2.um.ac.id/index.php/jtppips/article/viewFile/2492/1503>

³⁹ Suaedi. “*pengantar filsafat ilmu*”... *Ibid* Hlm 4

⁴⁰ Suaedi. “*pengantar filsafat ilmu*”... *Ibid* Hlm 4-5

⁴¹ Murtianto. “*thomas hobbes : ketakutan sebagai dasar terbentuknya negara*” (noval argumentum. Vol 1. No 1. 2022) Hlm 103 akses di <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/noa/article/download/4466/2395>

⁴² Oktaviani, jusmalia, & teguh puja pramadya. “*model negara kekuasaan : tinjauan pemikiran hobbes dan niccolo machiavelli*” (Indonesia perspektive. Vol 4. No 2. 2019) Hlm 181-182 akses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/26701/16088>

yang begitu kuat, tidak didominasi oleh apapun dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi negara yang sangat kuat tidak bisa diancam dan dihancurkan. Bahkan kepentingan negara *leviathan* tersebut haruslah menjadi nomor satu atas apapun, meskipun moral dan agama harus dibelakangi.⁴³

Pandangan berbeda dilihat dari gagasan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), melihat manusia pada tatanan alamiah baik, ia memiliki kebaikan yang melekat dalam diri sehingga manusia pada dasarnya tidak suka berperang, karena mereka sejak awal diciptakan tidak berdasarkan rasa benci dan dendam. Kondisi perang merupakan fenomena sosial yang dimana menandai manusia memiliki kebebasan mutlak, yaitu kebebasan yang tidak memiliki keinginan menaklukkan sesama, bebas dari rasa takut, merdeka serta kebebasan yang tidak menimbulkan anarkis.

Bagi Rousseau kondisi manusia yang tidak menentu membuat setiap individu membuat kesepakatan disebut sebagai kontrak sosial, yakni sebuah konsep perjanjian bertujuan kehendak umum dan tuntutan terhadap kepentingan umum. Dimaksudkan dalam hal ini adalah eksistensi sebuah negara adalah untuk menjaga setiap individu tidak melanggar kehendak umum dan kebebasan untuk berbuat apa sudah jelas diatur oleh negara, namun aturan yang dibuat negara jelas untuk kepentingan umum.⁴⁴

Kemudian periode abad ke-20 yakni disebut abad kontemporer, massa ini menjadi rangkaian desentralisasi pemikiran yang berorientasi pada bahasa dan etika sosial. Dalam tahapan etika sosial menjelaskan mengenai persoalan apakah yang hendak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. abad ini, etika dan politik mendapatkan tugas dan tantangan yang lebih serius ditengah masyarakat yang kompleks (*complex society*).⁴⁵ Dalam ranah politik abad ke-20 melibatkan tantangan dan tugas yang semakin serius. Masyarakat menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai kepentingan dan identitas yang berbeda. Perubahan teknologi dan globalisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial dan politik. Etika dan politik dipanggil untuk menanggapi isu-isu seperti ketidaksetaraan, konflik etnis, lingkungan, dan tantangan global lainnya.

Memperhatikan sebuah etika dalam politik menjadi satu jalan untuk menghargai kemanusiaan, seperti apa yang dilihat sebelumnya bagaimana perjalanan pemikiran dunia dari berbagai tokoh memiliki pandangan penting dan tidaknya etika dalam politik. Tentu jika melihat masa kini, etika sangat dibutuhkan dalam perpolitikan karena bisa dilihat hampir semua negara menyepakati mengenai kesejahteraan umum dengan sistem pemerintahan yang berpanduan pada prinsip humanisme, kebebasan berekspresi, keterbukaan dan keadilan. Dengan ini, dibutuhkan sebuah konsep dalam politik yang bertujuan mengarah pada tindakan mementingkan kemaslahatan banyak orang, yakni sebuah perilaku dari masyarakat maupun pemerintah disepakati untuk ditaati dalam membentuk

⁴³ Nursanik & ida mursida. "*kritik nalar pemikiran politik thomas hobbes*" (al qisthas. Vol 11. No 2. 2020). Hlm 18-19 akses di <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/3794/2815>

⁴⁴ Sukri. Mhd. Alfahjri. "*kontekstualisasi pemikiran politik jean jacques rousseau di Indonesia*" (jurnal al-*aqidah*. Vol 13. No 1. 2021). Hlm 92-93 akses di <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/2754>

⁴⁵ Setyabudi. M nur prabowo & albar adetary hasibuan. "*pengantar studi etika kontemporer*" (malang : UB Press. 2017). Hlm 6

keepakatan secara bersama dari sudut pandang undang-undang, hukum, etika, Pendidikan, ekonomi dan sains yang dikenal sebagai etika politik.⁴⁶

Etika politik sangat penting karena ia menjadi sebuah kode tingkah laku (*code of conduct*), yang dikhawatirkan sikap dan perilaku para penyelenggara negara dan elit politik bisa berseberangan dengan visi, misi dan tujuan dari kekuasaan (negara). Demikian pula, tanpa kehadiran dari etika politik, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak dapat terwujud, karena pedoman sebagai nilai-nilai moral berpolitik dari seseorang tidak diberlakukan ataupun tidak ada. Menurut Haryatmoko bahwa etika politik memiliki tiga dimensi diantaranya.

Pertama tujuan yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, Dalam hal ini, kebebasan diartikan sebagai hak dan kemampuan individu untuk mengejar kehidupan yang bermakna tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain. Sementara itu, keadilan merujuk pada distribusi sumber daya dan keuntungan yang adil di dalam masyarakat. *kedua* sarana memungkinkan mencapai sebuah tujuan, proses pencapaian tujuan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika, sehingga tidak menjustifikasi penggunaan metode atau tindakan yang melanggar norma-norma moral. dan *ketiga* dimensi aksi politik memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik, Rasionalitas politik di sini mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan politik dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan moral. Adapun aksi politik yang rasional, harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap langkah atau keputusan yang diambil, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasarinya.⁴⁷

Etika politik menjadi sebuah nilai praktik politis dalam penilaian moral tentang perilaku seseorang dalam berpolitik, serta menjadi satu studi penting mengenai pengaplikasinya. Dalam etika politik yang menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah pemerintah boleh melakukan penyimpangan dalam kekuasaannya, atautkah boleh mengambil tindakan yang salah?,⁴⁸ konsep ini menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut dalam kajian nilai praktis yang berorientasi pada penilaian moral politik menjadi pertimbangan, bahwa setiap pemimpin tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, dan lebih mengedepankan kemaslahatan banyak orang dengan pertimbangan-pertimbangan moralis. menurut Ayi sofyan (2012) dalam buku “etika politik Islam” menjelaskan bahwa etika politik mengarahkan manusia kepada praktik hidup yang lebih baik, bersama-sama dengan orang lain dalam rangka mewujudkan sebuah institusi yang berkeadilan. Tentu yang diharapkan disini ialah keadilan diperoleh dari semua kalangan, tidak sekedar batas para elit yang ber-uang, etika politik mewujudkan sebuah kehidupan dengan nilai moral menjadi preferensi utama, ia menjelaskan ada tiga dasar konsep etika politik baginya, yakni *pertama* mengusahakan hidup bersama yang baik, *kedua*

⁴⁶ Marco. Gines. “*The Political Ethics And The Attribution Of Moral Responsibility To Public Organization : Its Scope And Its Limits*” (International Journal Of Humanities And Social Science. Vol 7. No. 4. 2017). Hlm 128 akses di <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1529-209620180000019008>

⁴⁷ Handoyo.dkk. “*etika politik edisi revisi*” (semarang : widya karya press. 2016). Hlm 61-62

⁴⁸Dennis, Thompson. “*Political Ethics*”. (*International Encyclopedia Of Ethics* . 2018). Hlm 2 akses di https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37093184/Political-Ethics-Revised_Version.pdf?sequence=5&isAllowed=y

memperluas kehidupan yang bebas, dan *ketiga* mendorong munculnya sebuah keadilan.⁴⁹

Pada hakikatnya, mereka yang menjadi pejabat pemerintah, hendaknya menjalani tugas sebaik mungkin amanah, jujur, tegas, berkharisma, dan kapabel sehingga mampu menggiring rakyatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan tujuan mulia.⁵⁰ Pentingnya etika politik tidak sekedar sampai pada pendengaran telinga, melainkan juga diimplementasikan oleh pemerintah maupun warga negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam etika politik, seseorang ataupun kelompok bisa bertindak secara praktis dalam politik dengan mengambil keputusan paling bijak, tentunya tujuan utama menguntungkan banyak orang.⁵¹

Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya mengenai pemikiran etika dan politik dari abad klasik Yunani sampai dengan abad kontemporer di Barat maupun Islam. Terdapat dua pandangan yang berpendapat *pertama* pentingnya etika dalam politik sangatlah penting, dan *kedua* etika tidak diperlukan dalam politik karena alasan-alasan etika mengganggu kerja dari politik. Pada poin pertama inilah peneliti tertarik untuk mengkaji perihal eksistensi sebuah etika dalam pelaksanaan proses politik itu penting atau disebut sebagai konsep etika politik. Konsep ini sangat penting dibutuhkan prinsip-prinsip moral yang dimana etika politik menawarkan keilmuan di dalamnya, sekaligus bentuk pengaplikasian. Bagaimana konsep ini mempertanyakan dan menerawang kewajiban manusia sebagai manusia yang seharusnya memanusiasikan manusia, memperhatikan *The rule of law*, prinsip demokrasi, jaminan hak asasi manusia (HAM), serta struktur kebudayaan dan keadaan sosial.⁵²

Diskusi mengenai persoalan etika politik memang menjadi sangat urgent di berbagai belahan dunia saat ini. Hal ini dikarenakan etika politik berkaitan erat dengan bagaimana individu yang terlibat dalam dunia politik, baik sebagai pemimpin, aktor politik, maupun pejabat publik, harus memiliki sikap pertanggungjawaban etis terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Pentingnya etika politik terletak pada dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ketika para pemimpin dan pejabat publik bertindak dengan integritas dan moralitas, hal ini dapat menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi negara. Sebaliknya, jika etika politik diabaikan, bisa muncul kebijakan yang merugikan masyarakat dan ketidakadilan.⁵³

Salah satu problem etika politik yang masih mengakar hingga kini adalah tentang korupsi politik, konsep ini merujuk pada praktik-praktik korup yang

⁴⁹ Sofyan. Ayi. "*etika politik Islam*" (Bandung : pustaka setia. 2012). Hlm 59

⁵⁰ Muluk. Hamdi. "*mozaik psikologi politik Indonesia*" (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2010). Hlm 65

⁵¹ Prihatin. Romadhon. "*Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*" (Skripsi. Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga. 2014). Hlm 75 akses di <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15755/> Dennis, Thompson. "*Political Ethics*".....*Ibid* Hlm Xxiv

⁵² Budiardjo, Miriam, "*dasar-dasar ilmu politik*" (Jakarta : PT Gramedia pustaka utama. 2008) hlm 20

⁵³ Ritaudin, M. Sidi. "*Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa.*" (Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol 10. No 2. 2014). hlm 12-18. Akses di <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/1899>

melibatkan para aktor politik atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik dalam memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Fenomena ini mencakup berbagai tindakan tidak etis, mulai dari penerimaan suap dan Nepotisme hingga penggelapan dana publik. Korupsi politik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas lembaga-lembaga demokratis, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mempengaruhi kebijakan publik agar lebih menguntungkan kelompok tertentu. Perdebatan seputar korupsi politik tak terhindarkan dari permasalahan baik dalam institusi maupun perilaku individu. Korupsi telah merubah karakter partai politik, dimana perilaku korup sudah tercampur dengan elemen-elemen partai politik, menimbulkan dampak negatif pada integritas dan eksistensi lembaga politik. Bahkan, korupsi telah menjadi semacam budaya yang merasuki struktur politik, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi, menciptakan keraguan atas komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin memburuk.⁵⁴

Dalam konteks Indonesia, moral masyarakat tercermin dengan jelas dalam Pancasila, yang merupakan dasar moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman etika politik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aktor politik. Lima sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, memberikan landasan moral yang kuat untuk berpolitik. Aktor politik di Indonesia seharusnya menjadikan Pancasila sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sikap pertanggungjawaban etis harus tercermin dalam transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.⁵⁵

Dalam upaya mewujudkan cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia melalui proses politik yang sehat, kejujuran dalam berpolitik dianggap sebagai landasan etis yang harus dikedepankan oleh setiap orang. Namun, disayangkan bahwa kejujuran sering kali menjadi mitos politik yang dianggap kuno dan terlalu tradisional oleh sebagian politisi saat ini. Kejujuran tampaknya nyaris selalu hilang dalam setiap tahapan demokrasi, seperti pemilu, pilkada, dan perhelatan politik lainnya. Awalnya, ketidakjujuran membawa dampak serius pada kualitas kerja dalam melayani rakyat, yang seharusnya dilakukan dengan serius dan kongkret. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik tertuju pada sosok wakil rakyat karena kinerja yang buruk dan berbagai masalah etika. Seperti beberapa contoh kasus yang terjadi di indonesia hari ini diantaranya kasus korupsi para pemimpin DPR diantaranya kasus Aziz Syamsuddin dinyatakan sebagai tersangka kasus suap korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah, kasus Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terbukti sebagai

⁵⁴ Alfa, Pandu, and Khairul Fahmi. "Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia." (Journal of Social and Policy Issues. Vol 2. No 2. 2022). Hlm 82 akses di <http://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/download/43/38>

⁵⁵ Della Ardhani, Marshandha. Dkk. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari." (Gema Keadilan. Vol 9. No 2. 2022). Hlm 82-86 akses di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/16167/8109>

mengintervensi proses penanggaran, pengadaan barang dan jasa dalam proyek E-KTP yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 Triliun,⁵⁶ kasus Taufik Kurniawan yang merupakan wakil ketua DPR periode 2014-2019 terbukti melakukan pidana korupsi diterimannya dari hasil pengurusan DAK untuk kebun dari perubahan APBN senilai Rp 3.65 miliar dan pengurusan DAK untuk purbalingga bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1.2 miliar,⁵⁷ Kasus korupsi Johnny G Plate menara BTS 4G kominfo rugikan negara senilai Rp 8 Triliun,⁵⁸ kasus pelanggaran kode etik dilakukan oleh pimpinan KPK Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran berat karena bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo yang saat itu menjabat sebagai menteri pertanian, padahal saat itu sedang di usut kasus korupsi di kementan oleh KPK, kemudian tidak jujur melaporkan kekayaan pada LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), dan pelanggaran lainnya.⁵⁹

Pentingnya kejujuran bukanlah sekadar keutamaan moral yang berakhir setelah seseorang mencapainya. Kejujuran menuntut usaha keras yang berkelanjutan sepanjang waktu. Meskipun kita mungkin jujur hari ini, hal itu tidak menciptakan identitas sebagai manusia jujur secara otomatis. Kejujuran harus terus dibuktikan dan diperjuangkan dalam segala situasi. Tantangannya, situasi-situasi yang membahayakan kehidupan atau eksistensi sering kali mendorong kita untuk mengabaikan atau bahkan meninggalkan kebenaran murni. Aktivitas politik, sebagai salah satu ranah yang memicu kecenderungan politisi untuk berperilaku tidak jujur, sering kali dijejali dengan praktik "*white lies*" atau berbohong demi kebaikan. Padahal, sebenarnya, berbohong demi kebaikan sejatinya setara dengan pembenaran segala cara.⁶⁰

Ketika tujuan dianggap benar, ada kecenderungan untuk menggunakan segala cara, termasuk berbohong. Penting untuk merefleksikan kembali nilai kejujuran dalam politik dan mengatasi tekanan situasional yang mungkin menggiring praktik-praktik tidak etis. Dalam dunia politik, menegakkan kejujuran membutuhkan keberanian yang besar. Keberanian ini harus didasari oleh kesadaran bahwa proses politik yang tidak sehat tidak hanya merugikan perkembangan demokrasi, tetapi juga merusak struktur dan sistem politik yang seharusnya dihormati dan diikuti bersama.⁶¹

Adapun isu etika politik dalam aspek global di dilihat dari bagaimana etika politik mewujudkan Hak Asasi Manusi (HAM) dalam konteks global. Dimaksudkan

⁵⁶ Kompas.com. "*awal mula kasus korupsi E-KTP yang hingga seret Setya Novanto*" akses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya> pada 29 Desember 2023

⁵⁷ Tempo.co. "*daftar pimpinan DPR yang terjerat Kasus Korupsi*" akses di <https://nasional.tempo.co/read/1510703/daftar-pimpinan-dpr-yang-terjerat-kasus-korupsi> pada tanggal 29 Desember 2023

⁵⁸ Tribunnews.com. "*fakta kasus korupsi Tower BTS : Rugikan negara Rp 8 Triliun hingga menkominfo diperiksa 3 kali*" akses di <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/05/17/fakta-kasus-korupsi-tower-bts-rugikan-negara-rp-8-triliun-hingga-menkominfo-diperiksa-3-kali> pada 29 Desember 2023

⁵⁹ Kompas.com. "*daftar pelanggaran etik yang bikin firli bahuri didesamundur dari ketua KPK*" Akses di <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/19441351/daftar-pelanggaran-etik-yang-bikin-firli-bahuri-didesak-mundur-dari-ketua> akses pada 29 Desember 2023

⁶⁰ Dwihantoro. Prihatin. "*etika dan kejujuran dalam berpolitik*" (politika. Vol 14. No 2. 2013) hlm 12-14 akses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/7774>

⁶¹ Dwihantoro. Prihatin. "*etika dan kejujuran dalam berpolitik*"....Ibid Hlm 14

dalam hal ini adalah HAM menghubungkan negara dan masyarakat di seluruh dunia menciptakan peluang untuk mengakses ruang yang sama, kebebasan yang sama dan perlindungan yang sama atas kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi diskusi penting dalam etika politik, terutama pasca perang dunia ke II (kedua), pada tahun 1948 dideklarasikan universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatnya diskursus persoalan kemanusiaan yang perlu menjadi perhatian dunia, terutama disini negara-negara besar mengakui dan tunduk pada aturan pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan asas hak asasi manusia internasional. Disinilah dapat di perhatikan bahwa eksistensi negara tidak bisa mengklaim secara mutlak urusan HAM menjadi urusan domestik.⁶²

Urusan ini dilatarbelakangi dari piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, piagam ini memuat bahwa PBB menjelaskan bahwa keyakinan pada HAM merupakan bentuk menghargai harkat dan martabat manusia. Sekaligus tujuan dalam pasal 1 ayat 3 menerangkan tujuan PBB adalah mendorong dan memajukan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau bahasa. Sekaligus juga dalam pasal 55 piagam PBB menerangkan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai universal, ketatan pada HAM, dan kebebasan yang sama bagi semua orang. Titik inilah etika dalam politik global menjadi kajian yang serius, bahkan seperti yang di paparkan sebelumnya mengenai keseriusan lembaga dunia mulai meninjau dan peduli kembali pada kemanusiaan dunia. Muatan ini jelas dalam tiga instrumen pokok HAM internasional dalam istilah "*International Bill of Human Rights*" diantaranya pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*), kedua Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant On Economic Of Civil And Political Rights*), dan Ketiga Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (*International Covenant Of Economic, Social, and Cultural Rights*).⁶³

Dalam konteks etika politik dalam isu global, membawa arus pada bagaimana setiap negara di berbagai belahan dunia saat ini konsen pada tema yang sama, tema kemanusiaan. Setiap negara saat ini saling berhubungan dan saling bergantung, perlindungan dan pemenuhan menjadi tanggungjawab bersama-sama negara dan pemerintah. Konsep keadilan dalam isu global pun menjadi konsen serius juga dalam etika politik, prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi siapapun tanpa mendiskriminasi. Dalam hubungan global, setiap orang individu atau kelompok saling berinteraksi, prinsip keadilan menjadi isu hangat saat-saat ini sebab ditegakkannya, maka sama halnya ditegakkan nilai HAM yang mencerminkan penghormatan pada harkat dan martabat manusia dunia.⁶⁴

Dalam melihat semakin khusus dari konsep etika politik di penelitian ini, maka penulis memfokuskan dengan membandingkan dua tokoh pemikir modern

⁶² Smith. Rhona K,M. Dkk "*hukum hak asasi manusia*" (Yogyakarta : pusat studi hak asasi manusia universitas islam indonesia. 2008). Hlm 34-35

⁶³Smith. Rhona K,M. Dkk "*hukum hak asasi manusia*" *Ibid* Hlm 36

⁶⁴ McDonald, Hamish. "*Demokrasi: Indonesia in the 21st century*" (St. Martin's Press, 2015) hlm 16

dalam kajian etika politik, Franz Magnis Suseno. Franz Magnis Suseno merupakan Akademis, Pastor, Filsuf, Budayawan, Sejarahwan berwarga negara Indonesia, namun lahir di negara Jerman. Suseno adalah seorang akademisi yang hingga kini masih aktif mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Ia bisa dikatakan merupakan tokoh intelektual penting Indonesia yang memiliki kedalaman berpikir, kritis, sekaligus sosok pemikir yang karyanya banyak mengenai etika dan politik. Bahkan, salah satu bukunya secara khusus membahas mengenai etika politik berjudul *“Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”*,⁶⁵ sekaligus pemikir hebat yang masih aktif menjadi pemateri mengenai etika politik di berbagai kampus dan beberapa kanal youtube.⁶⁶

Etika bagi Suseno sebuah ilmu bagian cabang dari filsafat. Moral baginya merupakan bagaimana manusia diperintah hidup dengan ajaran norma yang berlaku semestinya. Sedangkan etika adalah sebuah proses reflektif atas ajaran moral yang ada. Bagi Suseno, etika menjadi bagian sistem nilai bercorak normatif yang bersifat teknis dan praktis, dan sebagai ilmu memiliki corak sistematis dan ilmiah.⁶⁷ Terdapat tiga alasan yang ditemukan mengapa etika sangat diperlukan dan bersesuaian dengan kondisi Indonesia, *pertama* kehidupan masyarakat yang pluralistik, termasuk dalam bidang moral, *kedua* masyarakat mengalami proses transformasi secara signifikan dari pelosok sampai dengan seluruh penjuru tanah air, dan *ketiga* proses perubahan sosial budaya dan moral.⁶⁸

Lebih lanjut, Suseno menjelaskan bahwa moral mulai eksis ketika mengambil keputusan dalam bertindak dianggapnya baik karena ia mengetahui bahwa tindakan baik dan bermoral adalah yang semestinya menjadi kewajiban dilakukan. Ia menjelaskan sikap baik yang menjadi dasar kepribadian moral diantaranya nilai otentik, kejujuran, kemandirian moral, kesediaan dalam bertanggungjawab, kerendahan hati, serta pendekatan realistik dan kritis.⁶⁹

Gagasan mengenai etika dan politik Suseno tidak terlepas dari kondisi negara Indonesia yang begitu ia kagum dan cintai yang dibuktikan dengan banyak karya-karya mengenai etika politiknya berkenaan dengan kondisi di Indonesia. Ia memiliki kekhasan dalam pandangan etika bahwa penting mengambil ajaran moral tertentu

⁶⁵ Prihatin. Romadhon. *“Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno”* (Skripsi. Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga. 2014). Hlm 75 akses di <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15755/>

⁶⁶ Franz Magnis Suseno aktif menjadi pemateri tentang kajian filsafat, etika, sejarah dan politik di beberapa kampus dan channel youtube. Mengenai etika politik, Suseno aktif melakukan seminar di beberapa kanal youtube seperti channel *salihara arts center* dengan link channel <https://www.youtube.com/@KomunitasSaliharaArtsCenter>, circle Indonesia dengan link channel <https://www.youtube.com/@circlesIndonesia5323>, dan terbaru 3 bulan lalu seminar Franz Magnis Suseno mengenai etika politik berjudul “filsafat dan etika politik” di channel SKPB AT institute dengan link channel <https://www.youtube.com/live/GyEafbQYLLs?si=whk8GpMBq-d2nKS>

⁶⁷ Hadi. Rahmad, tri & arrasyid. *“etika politik aristoteles : kohesivitas etika dan politik”* (jurnal al-aqidah. Vol 12. No 2. 2021). Hlm 203 akses di <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/3398>

⁶⁸ Saumantri, theguh & bisri. *“moderasi beragama perprespektif etika : analisis pemikiran Franz Magnis Suseno”* (jurnal ilmiah falsafah. Vol 9. No 2. 2023). Hlm 103 akses di akses di <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Falsafah/article/download/2295/1808>

⁶⁹ Putri, Dyta Puspita, And Tengsoe Tjahjono. "Nilai Moral Dalam Film Biografi Dà Táng Xuán Zàng 《大唐玄奘》 Karya Zōu Jingzhī (邹静之)(Prinsip Moralitas Franz Magnis Suseno)." *Jurnal Pendidikan Bahasa Mandarin Unesa* 2.1 (2019).Hlm 3 akses di <https://www.e-journal.my.id/onoma/article/view/2289>

dalam bertindak, atau bagaimana manusia mengambil sikap dalam berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan tahu dan memahami makna baik-buruk dengan pertanggungjawaban rasional. Dalam pandangan politik pun seperti itu, Suseno memandang politik digunakan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketentraman serta kesejahteraan rakyat.⁷⁰

Etika politik juga diartikan sebagai asas moral yang disepakati oleh masyarakat maupun pemerintah dan dijalankan dalam proses kekuasaan, kemudian pelaksanaan maupun keputusan dibuat untuk kebaikan bersama. Konsep ini merupakan bentuk pengkhususan dari kehidupan kenegaraan.⁷¹ Suseno berpandangan bahwa etika politik hadir dalam mempertanyakan tanggung jawab kewajiban sebagai manusia, serta sebagai warga negara yang mentaati hukum yang berlaku.⁷²

Menurut Suseno, ada dua pertanyaan penting dalam etika politik, *pertama* bagaimana seorang penguasa menjadi institusi kenegaraan supaya bisa berjalan dengan adil dan bijaksana, dan *kedua* apa seharusnya menjadi tujuan dasar dari kebijakan politik?. Suseno berpandangan bahwa etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia dan bukan hanya sebatas pikir warga negara kepada negara ditempatinya saja. Baginya, Etika politik menjadi satu tolak ukur sekaligus tujuan seseorang menjadi penguasa dalam mengatasi ketidakadilan dan menegakkan keadilan yang semestinya, sekaligus menciptakan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua masyarakat, Tentunya diukur dengan prinsip nilai-nilai moral.⁷³

Tegasnya, Suseno melihat seorang penguasa yang menjalani nilai-nilai moral etika politik dari bagaimana mereka peduli terhadap masyarakat, entah itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah, mengatasi ketidakadilan, serta seorang pemimpin tidak bergerak sendiri, melainkan seorang pemimpin bekerja sama dengan rakyat dan para pembantunya untuk menjalankan kekuasaan. Disinilah kesadaran diri meskipun menjadi pemimpin, mereka juga membutuhkan masyarakat untuk aktif dalam mensupport roda pemerintahan. Suseno menegaskan bahwa sosok pemimpin haruslah mereka memiliki keluasan pengetahuan, kuat mental serta bertanggung jawab sebagai sosok pemimpin.⁷⁴

Hidup di negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga rakyat memiliki kesempatan mengakses dan ikut berpolitik.⁷⁵ Disinilah, Suseno melahirkan gagasan-gagasan besarnya mengenai politik yang berlandaskan budaya

⁷⁰ Saumantri, theguh & bisri. "moderasi beragama perprespektif etika : analisis pemikiran Franz Magnis Suseno" ...Ibid Hlm 101-102

⁷¹ Muhammad, nasar akbar & r. Yuli akhmad hambali. "Kejujuran dan etika dalam konsep politik machiavelli" (jurnal perspektif. Vol 5. No 1. 2021). Hlm 59 akses di <http://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/download/115/64>

⁷² Prihatin. Romadhon. " Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno"... Ibid Hlm 76

⁷³ Prihatin. Romadhon. " Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno"... Ibid Hlm 77-78

⁷⁴ Prihatin. Romadhon. " Konsep Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno"... Ibid Hlm 77

⁷⁵ Ruhpina. H.L. Said. "menuju demokrasi pemerintahan" (mataram : universitas mataram press. 2005). Hlm 129

masyarakat Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa dalam aspek toleransi dan gotong-royong. Ia memberikan gagasan penting bahwa keterlibatan semua kalangan masyarakat di negara Indonesia dalam politik menjadi satu hal yang dilindungi dan difasilitasi oleh negara yang terang diatur jelas dalam undang-undang.⁷⁶

Pancasila sebagai ideologi dan dasar bangsa Indonesia di dalamnya memuat lima sila/dasar, sila *pertama* ke-Tuhanan yang maha esa, sila *kedua* kemanusiaan yang adil dan beradab, sila *ketiga* persatuan Indonesia, sila *keempat* kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan *kelima* keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Suseno, lima sila tersebut memuat keseluruhan tujuan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terkenal dengan beraneka ragam ras, agama, suku, bahasa, budaya dan adat istiadat dengan memposisikan kesamaan, persatuan, kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sebagai hal paling utama.⁷⁷

Gagasan-gagasan politik dari Suseno berusaha untuk membangunkan masyarakat Indonesia untuk sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik yang menganut sistem demokrasi, sebuah sistem mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga sistem ini menampilkan bahwa keikutsertaan dalam politik masyarakat secara luas bisa mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa, tentunya Suseno menginginkan perpolitikan memperhatikan nilai-nilai moralitas. Keikutsertaan berpolitik tak lain mewujudkan tujuan besar bangsa Indonesia termaktub jelas dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.⁷⁸ meskipun Indonesia merupakan negara yang berbeda-beda ras, suku, budaya dan agama.⁷⁹

⁷⁶ Salah satu Undang-Undang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia yakni dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2017 pasal 2 berbunyi "*Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.*". Kemudian dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota pada pasal 10 ayat 1 dan 2. Bisa selengkapnya baca di https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SZEbzDdljS8MRLjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1698184322/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdih.kpu.go.id%2fdata%2fdata_pkpu%2f2022pkpu009.pdf/RK=2/RS=ohlOB.r3NzjamLge7W.0ltJaYO- akses pada tanggal 24 oktober 2023, dilihat di Nomor, Peraturan Pemerintah. "Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Diakses dari halaman [https://www.lhokseumawekota.go.id/aturan/PP 2045 \(45\): 202017](https://www.lhokseumawekota.go.id/aturan/PP%2045%20(45)%202017).

⁷⁷ Suryanti. Luh. "*Pancasila sebagai ideologi negara dan hak asasi manusia dalam menjaga Keutuhan negara kesatuan republik Indonesia*" (jurnal ilmiah dirgantara. Voll 5. VO 1. 2014). Hlm 40 akses di <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/101/98>

⁷⁸ Indonesia, Pemerintah Republik. "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*" (2002). Akses di <http://repository.crmsIndonesia.org/bitstream/123456789/172/1/UUD%201945.pdf>

⁷⁹ Saumantri, theguh & bisri. "*moderasi beragama perprespektif etika : analisis pemikiran Franz Magnis Suseno*".....*ibid* Hlm 103

DAFTAR ISI

PROLOG	vi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAGIAN 1.....	1
ETIKA DAN POLITIK	1
BAB 2	21
BIOGRAFI FRANZ MAGNIS SUSENO	21
BAB 3	28
KONSEP ETIKA POLITIK FRANZ MAGNIS SUSENO	28
BAB 4	82
ANALISIS.....	82
BAB 5	98
RELEVANSI DENGAN KONDISI DI INDONESIA	98
DAFTAR PUSTAKA.....	107

BAGIAN 1

ETIKA DAN POLITIK

1. Etika

a. Pengertian

Kata Etika berasal kata yang berasal dari Yunani “*ethos*” yang berarti watak. Etika merupakan bagian dari pembahasan dalam filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk.⁸⁰ artinya sebagai ilmu, etika mencoba mencari kebenaran dengan metode filsafat yang mencari kebenaran sedalam-dalamnya hingga menemukan jantung universal yang bisa diterima dan dipergunakan oleh semua orang.⁸¹ Etika juga sebagai kelompok filsafat merupakan sikap kritis dan mendasar dari pandangan ajaran-ajaran moral.⁸² Menurut K Bertens bahwasanya etika merupakan nilai-nilai pegangan bagi seseorang atau sebuah kelompok dalam bertingkah laku.⁸³

Istilah etika muncul sebagai bentuk terminologi yang disepakati oleh manusia. Banyak sekali mendefinisikan bahwa etika diartikulasikan sebagai sopan santun, baik jahat, maupun buruk indah. Tapi pastinya etika berkoherensi dengan tingkah laku manusia. Norma bagi manusia sudah menjadi hal yang normal ketika menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, jangan sampai mencampur aduk istilah yang memang bukan bagian dari dirinya.⁸⁴

Secara historis, etika digunakan sebagai usaha filsafat yang lahir dari keambrokan tatanan moral lingkungan kebudayaan Yunani 3 abad sebelum masehi. Yang artinya bahwa manusia dalam etikanya menunjukkan cara berbuat ataupun tindakan yang menjadi persetujuan sekelompok manusia. Etika telah hadir dalam masyarakat sejak zaman yang sangat lama, dan manusia mungkin sudah memiliki pemahaman tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk sejak dulu. Perkembangan etika dapat ditelusuri kembali ke masa Yunani kuno, ketika banyak filsuf memulai eksplorasi filosofis mengenai etika.⁸⁵

Etika dan moral berfungsi sebagai pedoman yang membantu manusia menjawab pertanyaan mendasar tentang cara hidup dan bertindak yang seharusnya. Dalam situasi ini, etika menyediakan arahan bagi manusia dalam tindakan mereka. Tujuan utama etika adalah membantu manusia tidak hanya mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh pihak lain, tetapi juga untuk memahami mengapa mereka harus bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut. Hal ini bertujuan agar

⁸⁰ Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat, Etika Dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks KelIndonesiaan." (*Humanika*. Vol 17. No 1. 2013). Hlm 81 akses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/viewFile/5313/4774>

⁸¹ Poedjawijatna. *Etika : Filsafat Tingkah Laku*. (PT Rineka Cipta .1982) Hlm 6

⁸² Sofyan, ayi. "*kapita selekta filsafat*" (bandung : CV Pustaka Setia. 2010). Hlm 393

⁸³ K. Bertens. "*Etika*". (Pt Gramedia Pustaka Utama, Cet 11. 2011). Hlm 5

⁸⁴ K. Bertens. "*Etika*".. *Ibid* Hlm 9

⁸⁵ Franz Magnis Suseno, "*Etika Dasar :Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*", (Yogyakarta: Kanisius, 1987), Hlm. 15.

manusia dapat memahami alasannya, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku ditinjau dari segi baik dan buruk.⁸⁶

Muhammad Said (1960) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak) dari manusia itu. Rumusan dan pengertian moral secara lebih komprehensif dan holistik rumusan formalnya sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Moral adalah seperangkat ide tentang perilaku kehidupan, yang dianut oleh sekelompok manusia dalam konteks lingkungan tertentu, dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan mereka.
- 2) Moral merupakan doktrin mengenai perilaku hidup yang baik, yang dibangun berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
- 3) Moral adalah perilaku sehari-hari manusia, yang ditentagai oleh kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan mereka.

Etika sebagai ilmu pengetahuan mengusahakan penggunaan standar yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia dan tidak hanya sebagian dari mereka. Penting untuk menjalankan pembahasan mengenai teori etika guna memastikan bahwa setiap individu memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi hubungan antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Perbedaan dalam sikap, nilai, dan pandangan telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam perkembangan etika sosial saat ini. Diskusi mengenai etika merentang hingga berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor ekonomi, politik, teknologi, dan berbagai bidang lainnya. Tentunya etika yang bisa dinilai adalah sebuah perbuatan yang disadari, sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan tidak sadar tidak bisa dinilai baik-buruknya.⁸⁸

Etika pada hakikatnya eksis untuk mengamati mengamati realitas moral secara mendalam dan kritis. Etika tidak menjustifikasi dan memberikan ajaran, melainkan memeriksa nilai, kebiasaan, norma serta pandangan-pandangan berbagai sikap moral secara kritis. Etika berusaha untuk menjernihkan problem moral, sedangkan moral dalam tatanan kehidupan manusia selalu berada pada segi kebaikan dari apa perilaku dan keputusan yang dibuatnya. Tentu dalam hal ini moral ditinjau dari norma-norma yang berlaku sekaligus juga dari segi baik-buruk sebuah tindakan terbatas manusia.⁸⁹

b. Pendekatan Etika

Etika sebagai filsafat moral memiliki tiga macam pendekatan utama yang antara lain mencakup:⁹⁰

1) Meta-etika

Cara lain untuk mempraktekkan studi etika adalah dengan pendekatan yang disebut "Metaetika". Kata "Meta" berasal dari bahasa Yunani yang berarti

⁸⁶ Bakhtiar. Amsal. *"filsafat ilmu"* (Depok : PT Raja Grafindo. 2014). Hlm 165

⁸⁷ Muhammad Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), Hlm. 23.

⁸⁸ Surajiyo. *"ilmu filsafat suatu pengantar"* (jakarta : PT bumi aksara. 2014). Hlm 88

⁸⁹ Surajiyo. *"ilmu filsafat suatu pengantar".....Ibid* Hlm 89

⁹⁰ Nurani Soyomukti. *"Pengantar Filsafat Umum"*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. Cet 1.2011).

"melampaui" atau "melampaui". Metaetika mencoba melampaui studi langsung tentang moralitas dan berfokus pada bahasa dan ucapan yang digunakan dalam bidang moral. Ini merupakan penilaian yang tingkatnya lebih tinggi dari perilaku etis, yaitu analisis bahasa moral yang digunakan.⁹¹

Metaetika mengkaji logika spesifik yang mendasari ucapan etis. Meskipun secara gramatikal ujaran etis tidak berbeda dengan ujaran faktual (khususnya ujaran yang mengungkapkan fakta), namun jika ditelaah lebih dalam, dapat diketahui bahwa ujaran etis mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh ujaran lainnya. Metaetika memusatkan perhatiannya pada makna spesifik bahasa etis. Salah satu contoh dalam metaetika adalah analisis kata "baik" dalam konteks etika. Seorang filsuf seperti George Moore, misalnya, mungkin menganalisis arti khusus kata "baik" dalam pernyataan moral. Dia mungkin tidak akan menanyakan apakah tindakan seperti menjadi donor organ dapat dianggap baik secara moral. Sebaliknya, artikel ini akan menyoroti arti spesifik dari kata "baik" dan membandingkannya dengan penggunaannya dalam konteks yang tidak etis. Oleh karena itu, dia lebih tertarik pada analisis linguistik daripada penilaian moral secara langsung.⁹²

Bahasa dan semantik menjadi topik penting. Pertanyaan muncul mengenai apakah pernyataan etika memiliki arti tujuan atau apakah artinya lebih terkait dengan bahasa dan pemahaman subjektif. Meta-etika juga membawa manusia dalam membahas tentang moral naturalisme vs. moral non-naturalisme, di mana manusia memikirkan apakah nilai-nilai moral didasarkan pada realitas alamiah atau apakah mereka lebih bersifat supernatural atau abstrak. Meta-etika adalah sebuah perjalanan filosofis yang dalam, yang membantu menggali lebih dalam filsafat yang menerapkan etika. Ia membantu seseorang memahami perbedaan pendekatan etika dan menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptualisasi mendasar yang ada dalam etika. Sebagai pemandu dalam perjalanan ini, meta-etika memberikan dasar bagi pemahaman tentang kompleksitas nilai-nilai moral.

2) Etika Normatif

Etika normatif merupakan sebuah norma-norma yang didalamnya manusia dituntut bertindak secara baik dan berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan buruk dengan kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Etika ini menekankan kepada seseorang dalam tingkah lakunya secara individu ataupun kelompok untuk dilakukan penilaian. Sebagai manusia yang hidup sosial, tentunya mereka terikat oleh sebuah aturan-aturan yang ada dan menjadi kewajiban dari manusia untuk menjalankan dan menaati aturan tersebut.⁹³ Etika normatif menjadi bagian penting dari etika, sebab ia memberikan penilaian pada sebuah perilaku manusia. Tidak hanya menggambarkan perilaku manusia, tetapi juga menggagas argumentasi mengenai penilaian baik atau buruknya sebuah tindakan, serta mempertanyakan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah.⁹⁴

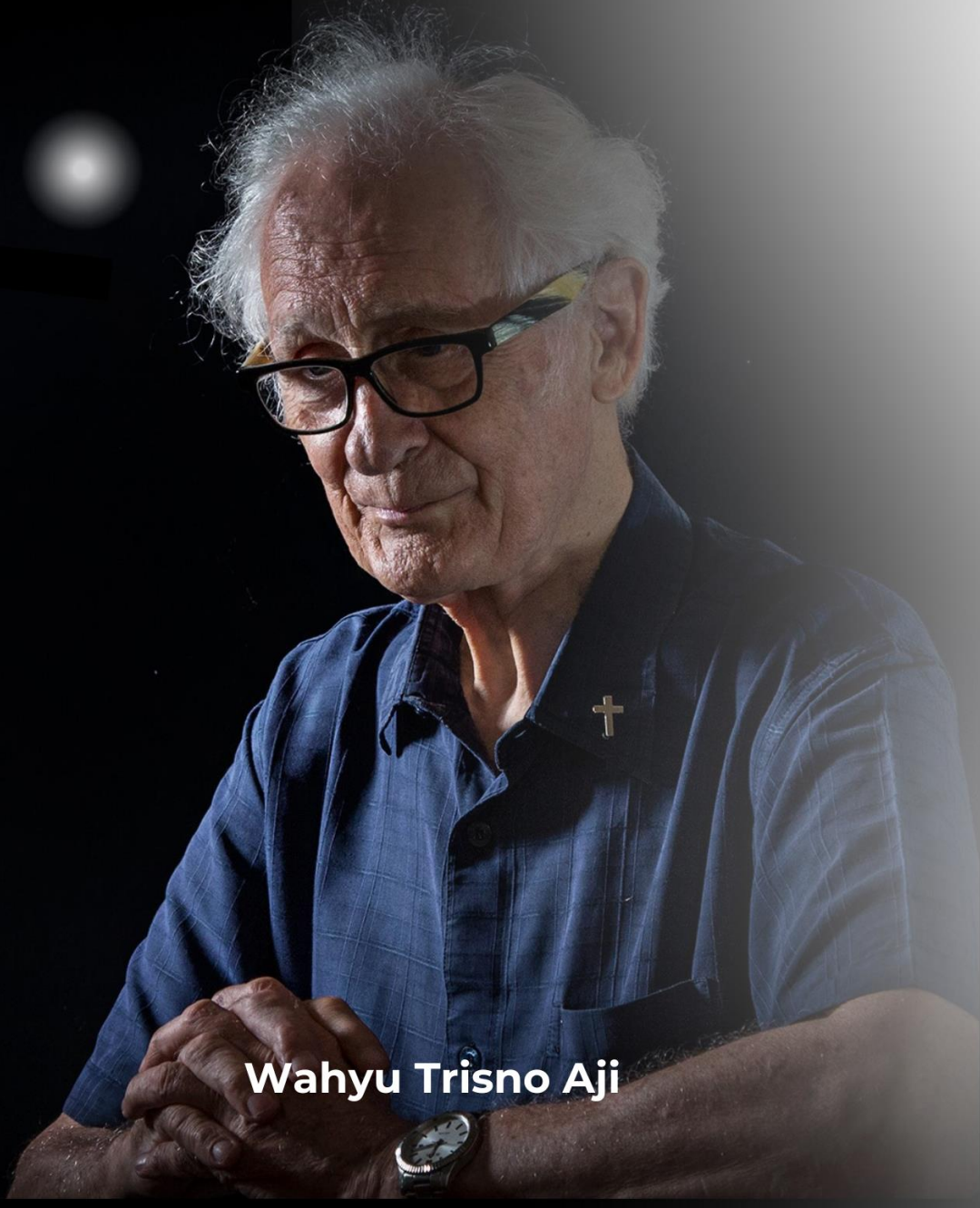
⁹¹ K. Bertens. "Etika"..... *Ibid* Hlm 16

⁹² K. Bertens. "Etika"..... *Ibid* Hlm 17

⁹³ Wiharto. Mulyo. "etika" (forum ilmiah indonusa. Vol 4. No 3. 2007). Hlm 199 akses di <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/505>

⁹⁴ Betresia, agnes. Dkk. "korupsi bantuan sosial covid-19 : analisis implementasi etika normatif pejabat publik di Indonesia" (dialogue. Vol 3. No 2. 2011). Hlm 14 akses di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/13126/6772>

ETIKA POLITIK FRANZ MAGNIS SUSENO



Wahyu Trisno Aji